KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

7955O19E

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

W.								
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 6 2 0			H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT	JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 80 308 282 5 726 000								
A.2 NIK								
A.3 Nama	ELDA TRIALISA	PUTRI						
B. PPh PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	_	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
4	21-402-01	368.195	368.195	0	5	18.41	0	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Re	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
	Nama Doki	ımen Biaya Pembayaran	Tanggal 2 {	3 dd 0 4	4 mm	2 0 2 2 <i>yyyy</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor :			Tanggal	dd 📗	mm	уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			_	
	nsi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	ITIMUR		
C.3 ID Subunit C					ППП	7		
C.4 Tanggal		2 8 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5 Nama Penan	datangan :	HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan \	Najib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa α	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara		